

BAB II  
KONDISI MASYARAKAT SEBELUM  
REVOLUSI SOSIAL DI ACEH

A. Sosial Politik

Kekuasaan politik di Aceh sekitar pertengahan abad ke XIX dan sebelumnya ditandai dengan kuatnya kekuatan sultan. Kekuasaan sultan ini membawahi kekuasaan Uleebalang dan ulama.<sup>1</sup>

Dualisme pemikiran di dalam pemerintahan tidak tampak. Semua bagan yang ada pada pemerintahan sultan berjalan dengan baik. Hubungan antara sultan, uleebalang dan ulama sangat baik, tidak terjadi pertentangan, khususnya antara uleebalang dan ulama. Keharmonisan ini disebabkan tidak adanya perbedaan kelas antara keduanya. Keduanya menyatu dalam berbagai tugas, walaupun secara kenun (undang-undang negara) sudah dibedakan tugas-tugasnya secara terperinci.

Setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dari sultan kepada Belanda, maka Belanda menjadikan sultan

---

<sup>1</sup> Drs. H. Ismuha. Pengadilan Agama dan Mahkamah - Syari'ah di Aceh Dahulu, Sekarang dan Nanti, dalam 'Bunga Rampai tentang Aceh, Prof. DR. Ismail Sunny, ed. Bhara, 1980, Jakarta. hal. 230.

penguasa bayangan untuk mengelabui masyarakat Aceh. Sejak itulah Belanda menggunakan para ulëebalang (tidak semuanya, hanya mereka bekerja sama dengan Belanda di dalam menguasai Aceh) sebagai pembantunya. Sejak itulah kedudukan ulama tergerser pada pemerintahan Aceh.

Kekuasaan sultan hanyalah kekuasaan bayangan yang tidak mempunyai hak sedikit pun, bahkan pada akhirnya sultan dibuang ke Ambon, karena dicurigai berhubungan dengan pemberontak.<sup>2</sup>

Setelah perang Aceh selesai sudah tidak ada lagi permasalahan dengan para pemimpin negeri tersebut, tetapi Belanda tidak terlalu gegabah untuk merubah semua struktur kekuasaan politik yang ada di Aceh. Ketidakegagahan Belanda sangat beralasan dan ini merupakan salah satu sistem politik awal yang diterapkan di Aceh.

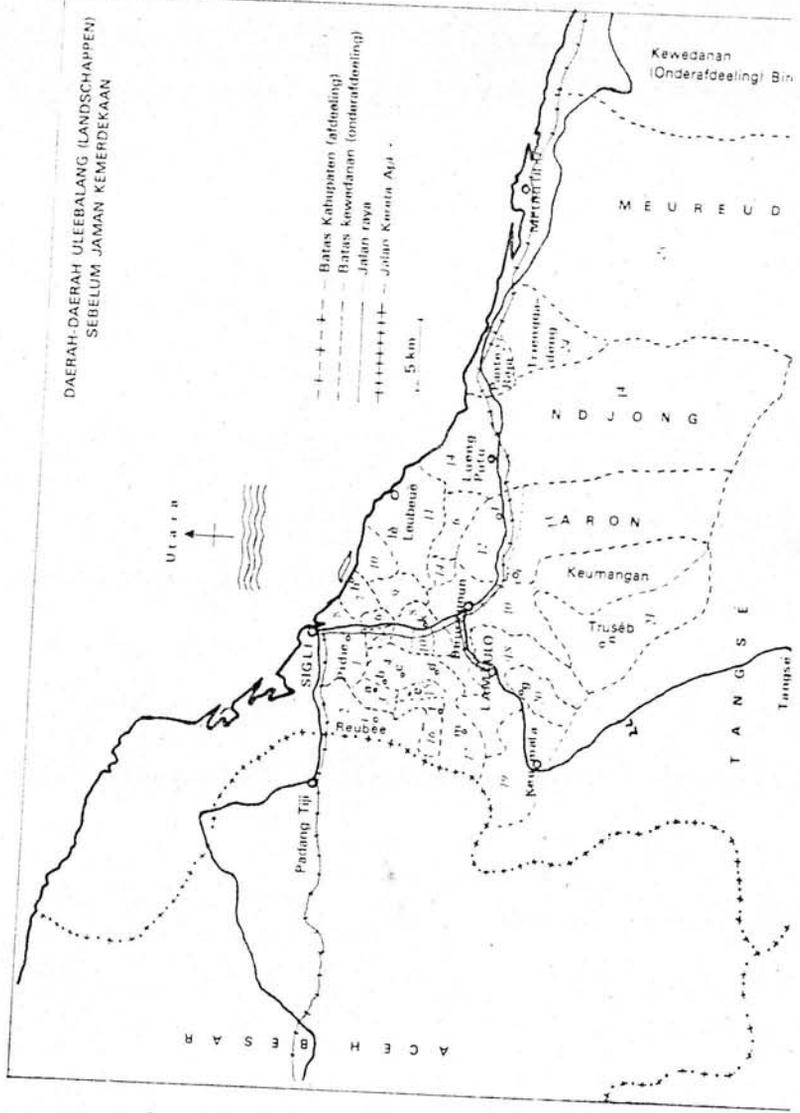
Penyerahan Sultan kepada Belanda, bukan berarti bahwa semua daerah yang ada di bawah kekuasaan Sultan akan menyerah pada Belanda. Sebab pada Uleebalang mempunyai hak otonomi di dalam pemerintahan daerahnya.

Satu-satunya jalan adalah merangkul para ulëebalang dalam mencapai tujuan kolonisnya. Maka dengan

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.190.

DAERAH-DAERAH ULEEBALANG (LANDSCHAPPEN)  
SEBELUM JAMAN KEMERDEKAAN



1. Landschap XII Mukim Pidie
2. Landschap V Mukim Reublé
3. Landschap II Mukim Aréh
4. Landschap VIII Mukim Samandira rian Lrok Képi
5. Landschap Mukim Krung Seumidjeun
6. Landschap III Mukim Bembé dan Unte
7. Landschap III Mukim Gireng
8. Landschap III Mukim Piseung
9. Landschap III Mukim Iboih
10. Landschap IX Mukim Keumangan
11. Landschap VI Mukim A Leubeu
12. Landschap III Mukim Glumpang Payong
13. Landschap III Mukim Aron
14. Landschap VII Mukim Ndjong
15. Landschap Mukim Ilo
16. Landschap Mukim Matarum
17. Landschap Mukim Andeue dan Lala
18. Landschap V Mukim Cumbok
19. Landschap II Mukim Keumala
20. Landschap II Mukim Titoeu
21. Landschap II Mukim Truséb
22. Landschap Mukim Tangsé
23. Landschap Mukim Pantó Raja
24. Landschap Mukim Trieng Gadung
25. Landschap Mukim Maureudo
26. Landschap Mukim Gaumpang (tidak kelihatan)

- a. Aréh
- b. Gerot
- c. Samandira
- d. Gie Gapui
- e. Ilo
- f. Matarum
- g. Titoeu
- h. Giegang
- i. Glumpang Misyuek
- j. Teupin Reya
- k. Lampoih Saka
- l. Reublé
- m. Lala
- n. Truséb

cara demikian, secara bertahap selama 49 tahun (mulai tahun 1873 hingga 1922) barulah diadakan perubahan-perubahan yang revolusioner dalam struktur pemerintahan Aceh.

Perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut :

"Sesudah perang Aceh selesai urusan pemerintahan swapraja ini diatur lebih lanjut oleh pemerintahan Hindia Belanda. Swapraja-swapraja dalam suatu lingkungan diawasi oleh seorang pengrehpraja Belanda Controleur atau Gezagheber dan Gezag dalam lingkungan ini disebut Onderafdeling. Beberapa Onderafdeling diawasi oleh seorang Assistenet-Resident, dan di pusat Kutaraja berkedudukan seorang Gubernur".<sup>3</sup>

Swapraja-swapraja (Zelbesturen) yang telah diakui oleh pemerintah Hindia Belanda menurut peraturan organisasi pemerintah dalam Sbt 1 1922 No.451 memperlihatkan secara jelas perubahan-perubahan struktur pemerintahan secara menyeluruh. (Lihat Lampiran 1).

Dengan perubahan struktur ini secara langsung mempengaruhi kepada pengaturan segala urusan dalam daerah-daerah uleebalang. Kalau dahulu para penguasa (daerah uleebalang atau lainnya) mempunyai hak otonomi penuh dalam mengatur daerahnya. Maka hak tersebut di

---

<sup>3</sup> Mr. T. Moehammad Hasan, Perkembangan Swapraja di Aceh sampai perang Dunia II, dalam Bunga Rampai tentang Aceh, Prof DR. Ismail Sunny, ed. Bharata 1980, Jakarta, hal.191

batasi hanya pada urusan pertanian, pendidikan dasar dan sosial lainnya. Semua urusan yang ada kepentingan Belanda di dalamnya harus diatur langsung atau berkonsultasi dengan Belanda, tidak boleh ditangani langsung oleh swapraja-swapraja bersangkutan. Dalam hak pertanian pun (suatu misal), hak masyarakat dan penyediaan bibit, dalam hal penjualan dan penentuan harga, semua di tangan persetujuan Controleur atau Gezaghebber Belanda.<sup>4</sup> Sedang masalah pajak harus dimusyawarahkan dengan Gubernur jenderal di Betawi dan bila disetujui maka akan dikeluarkan secara resmi peraturan-peraturan pajak dari pusat (Betawi).

Selain itu semua penghasilan negeri, baik yang di hasilkan oleh bermacam-macam wase, bea ekspor import, wase tanah dan wase hutan dipergunakan untuk kepentingan adat setempat, tetapi setelah Belanda menguasai Aceh dan mulai merubah struktur pemerintahan yang ada, maka semua hasil negeri harus masuk ke kas Negara.<sup>5</sup>

Perubahan-perubahan inipun memaksa masyarakat untuk memandang kepada instansi-instansi pemerintah

---

4 Ibid, hal.196

5 Ibid, hal.197

daerah yang dibawahhi oleh Conteleur dengan tanpa kewibawaan. Bila dahulu masyarakat memandang Kuechik, Imuem, sampai pada klas atas, seperti uleebalang dan lainnya, sebagai figur-figur pemimpin masyarakat yang kharismatik. Kini dengan perubahan-perubahan yang ada menyebabkan adanya perubahan pandangan masyarakat akan kekharismatikan pemimpin-pemimpin tersebut.

Berubahan-perubahan nilai dan sikap masyarakat itu dapat dilihat pada kekuatan-kekuatan masyarakat yang anti Belanda, diantaranya : TPR dan organisasi kependuan PUSA yang dipimpin oleh Husin Al Mujahid.<sup>6</sup> Dimana gerakan yang dilakukan oleh TPR dan kependuan PUSA dimulai dari Idie, ibu kota Onderafdeling, termasuk wilayah Onderafdeling di Aceh Timur.

Jadi struktur politik pemerintahan yang diatur oleh Belanda tidak secara langsung meniadakan kebebasan dalam hal yang pernah dimiliki oleh masyarakat Aceh.

Untuk mencapai kolonialnya secara maksimal Belanda memeralat uleebalang yang berada dibawah kekuasaannya untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Keadaan yang demikian mendorong masyarakat Aceh untuk mencari jalan ke luar. Perlu diketahui di

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Husin Yusuf ( Eks pemuda PUSA), pada tanggal 3-7-1986. di Yogyakarta.

sini, bahwa pada waktu itu Jepang sudah meluaskan pengaruh dan jajahannya disebagian besar Asia Tenggara. Berita tentang kebesaran Jepang sampai pada masyarakat Aceh dan ulamanya. Akhirnya para ulama mengirimkan utusannya ke pulau Pinang dan Malaya untuk mengadakan kerja sama melawan Belanda yang sedang berkuasa di Aceh. Setelah diadakan kesepakatan kemudian dianjurkan (atas kesepakatan bersama) membentuk suatu organisasi. Organisasi tersebut bernama "Fujiwara Kikan", atau yang dikenal dengan barisan F<sup>7</sup>. Melalui organisasi ini Jepang mengindroktinasi para pemuda yang tergabung dalam organisasi tersebut. Setelah itu diadakan kesepakatan untuk mengundang Jepang ke Aceh. Kesepakatan ini di ambil setelah diadakan pengecekan ke pulau Pinang dan Malaya. Selain itu juga diadakan rapat rahasia di Lam Nyong (rumah T. Nyak Arief), yang dihadiri Teungku Daud Beureuh, Tengku Abdul Wahab yang keduanya dari PUSA, serta Teuku T. Nyak Arief (panglima segi XXVI mukim) T. Muhammad Ali panglima Polem (panglima segi XXII mukim). T. Ahmad (uleebalang Jeunib-Samalanga). Mereka mengucapkan krar bersama yaitu : dengan bersumpah setia pada agama Islam, bangsa dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah Belanda dan bersetia

---

7 ..... Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Aceh, DP & K, proyek Investarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983. hal. 17

pada Dai Nippon.<sup>8</sup> Rapat ini diadakan pada bulan Desember 1941.<sup>9</sup>

Sebelum kedatangan Jepang yang di jadwalkan dan disepakati oleh Jepang itu sendiri dan masyarakat Aceh, ulama dan partisipannya mengerakkan rakyat untuk mengadakan sebotase-sabotase, agar Jepang masuk Aceh tanpa banyak mengalami kesulitan.

Pada tanggal 19 - 20 Januari 1942 terjadi sabotase kawat-kawat telepon dan rel kereta api yang dilancarkan oleh rakyat di Seulimeum dan Indrapuri.

Pada tanggal 24 Januari 1942 Conteuleur Belanda di Seulimeum, Tinggelman dibunuh oleh rakyat, dan lain lain kegiatan lagi yang dilakukan oleh rakyat di Aceh Besar. Diluar Aceh besar juga terjadi perlawanan-perlawanan fisik, yaitu tanggal 25 Januari 1942 Asistent Resident Sigli, Van de Berg juga mati terbunuh oleh rakyat ..... pada tanggal 9 Maret 1942 rakyat dibawah pimpinan T. Sabi Lageun menyerang asrama tentara Belanda di Lageun dan kantor pemerintah di Calang.<sup>10</sup>

Sabotase-sabotase yang dilancarkan oleh masyara-

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 13-14. Lihat M. Yoenoos Djamil, Riwayat Barisan "F (Fujiwara Kikan) di Aceh, (Banda Aceh: Pusat latihan ilmu-ilmu sosial, Aceh, 1975) hal.4-5.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid. hal.15. Lihat Muh Ibrahim (ketua), Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh, P & PKD 1978/79, hal. 137-147.

kat sempat menjadikan Belanda berfikir dan bertanya, mengapa terjadi sabotase yang semestinya tidak terjadi, khususnya dalam keadaan yang sangat membahayakan masyarakat dan Belanda sendiri akan kemungkinan serangan Jepang yang berada di pulau Pinang dan Malaya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Belanda tidak pernah tahu rapat-rapat rahasia yang diadakan oleh ulama dan masyarakat dalam rangka memasukkan Jepang ke Aceh.

Setelah keadaan memungkinkan Jepang masuk Aceh, maka diadakan kontak kembali atau yang terakhir pada S. Musabhuti (Komandan Jepang yang ada di pulau Pidang) dan Barisan "F" yang ada di pulau Pidang dan Malaya.

"Pada tanggal 19 Februari 1942 satu rombongan anak muda Aceh sejumlah 7 orang yang dikirim oleh S. Musabhuti dari pulau Pinang sebagai barisan "F" (Fujiwara Kikan) mendarat di simpang Uliuem Aceh Timur. Uleebalang Simpang Uliuem yang bernama Teuku Husin melakukan penahanan terhadap mereka semua, karena dicurigai sebagai Spion Jepang. Serta mereka dikirim ke Idie untuk dipenjara pada tanggal 25 Februari 1942 dilepaskan".<sup>11</sup>

Adapun di antara anak muda tersebut adalah Nyak Neh Montasik, Teungku Raden Montasik, Nyak Hasan Sigli,

Yahya Samalanga, Musa Sibreh dan M. Yatim<sup>12</sup>. Sedang organisasi "P" yang ada di Aceh sendiri, yaitu Said Abubakar dan Said Ali.

Dari Aceh ulama mengadakan kontak dengan masyarakat Aceh yang ada disana agar barisan Fujiwara Kikan dapat masuk Aceh bersama mereka.

Keadaan teratur sebelum Jepang masuk memungkinkan pada tanggal 12 Maret 1942 dengan lancar kapal-kapal Jepang mendarat di tiga tempat sebagai berikut : Peureulek (Aceh Timur), Kurang Raya (Aceh Barat) dan Sabang<sup>13</sup>. Kedatangan yang diharapkan ini semestinya di sambut dengan baik oleh masyarakat. Hubungan kerja sama antara rakyat Aceh dengan Jepang berjalan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan SPTB Syuzabuno-Lino ( Gubernur Aceh ) bahwa rakyat Aceh sudah bekerja sama dalam menghancurkan pengaruh-pengaruh Belanda. Dari pihak Jepang, sudah jelas kerja sama yang dilakukan mempunyai tendensi politis.

"Dalam waktu sepekan saja pengaruh-pengaruh Belanda sudah dapat dikikis walaupun tidak sama sekali. Adanya kerja sama ini disebabkan adanya

---

12 Ibid.

13 Ibid.

janji Jepang untuk membantu di dalam membela tanah air dan memperbesar hasil pekerjaan dan hasil negari! 14

Setelah Jepang kokoh kedudukannya di Aceh, mulai lah diadakan rencana pengaturan siasat rencana pemerintahan. Bila kita melihat struktur pemerintahan Jepang di Indonesia, khususnya di Aceh tidak ada perbedaan dengan Belanda, hanya penggantian-penggantian istilah saja.

"Struktur pemerintahan yang sudah diatur sampai masuknya Jepang tidak pernah diadakan perubahan lagi, akan tetapi namanya disesuaikan dengan sebutan Jepang sendiri. Keresidenan Aceh yang ditinggalkan oleh Belanda sampai dengan masa Jepang tidak mengalami perubahan status, yang berarti tidak diadakan perubahan yang bersifat fundamental, Karesidenan diganti dengan nama Syu, residen disebut dengan Syu Tyokan, Afdeeling menjadi Bunsyu, yang untuk jabatan Asisten residen di sebut dengan Bunsyutyo. Onderafdeeling dijadikan Gun dan untuk Controleur dipanggil dengan Gunty. Distrik atau Uleebalang-Schap dinamakan Son yang dikepalai oleh Sontyo sebagai ganti sebutan eleebalang dan Gampong diganti dengan Kumi yang diperintah oleh Kumityo. Untuk

---

14 ..... Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Aceh, Op.cit, hal.16.

jabatan-jabatan penting seperti Syu Tyokan dan Bunsyutyoyo dipegang langsung oleh pembesar-pembesar Jepang. Untuk jabatan Guntyo, Sontyo dan Kumityo dijabat oleh orang-orang Aceh.<sup>15</sup>

Selain ada kesamaan struktur, pemerintah Jepang membentuk kekuasaan kepolisian tersendiri, yang dahulu di bawah kekuasaan Pamong Praja.

Kepolisian itu sendiri ada dua macam, yaitu : Kepolisian Umum (Keimubu) dan Polisi Bersenjata (Tokubetu).

Sedang dalam bidang pengadilan, di jaman Belanda terdapat bermacam-macam pengadilan, tetapi di jaman Jepang hanya ada dua macam saja, yaitu : Tiho Hoin dan Ku Hoin. Menurut keterangan Aceh Syu Tyokan bertanggal 1 Oktober 1942 no.1 dan 2 dan kemudian dilengkapi dengan keterangan Aceh Syu Tyokan ter tanggal 13 April 1943 no.4 dan 5 bahwa kedua macam pengadilan tersebut meniadakan sebagian hak dari peradilanguntyo dan Suntyo. Dan pada bulan Desember secara tegas ditetapkan kedua macam pengadilan yang ada.<sup>16</sup>

Ku Hoin didirikan untuk tiap-tiap Gun dan Son,

---

<sup>15</sup> ..... Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Aceh Op.cit. hal.21-22

<sup>16</sup> Lihat Drs. Ismuha, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariat Aceh, Dahulu, Sekarang dan Nanti, Bharata, 1980 Jakarta, hal 233-240.

sedang Tiho Hoin didirikan untuk Aceh Syu yang berkedudukan di Banda Aceh. Selain itu, juga didirikan peradilan agama untuk Aceh yang mayoritas beragama Islam. Peradilan agama tersebut diberi wewenang dan mempunyai struktur tersendiri berdasarkan atas ketetapan Aceh Syu Tyokan yang disebut Atjeh Syu Rei no.12 (lihat Lamp. III) 17

Penambahan-penambahan ini tidak lepas dari tujuan Jepang untuk mempermudah dirinya dalam mengontrol masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Dan tidak secara langsung dengan dibukanya peradilan agama dalam struktur pemerintahan, Jepang menangani langsung urusan agama dan mengaturnya untuk kepentingan pemerintahannya sendiri.

"Untuk melihat perkembangan keagamaan di Aceh pada masa pendudukan Jepang, terlebih dahulu harus dilihat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah dalam bidang ini. Seperti telah disinggung dalam pendidikan agama mengalami kemerosotan, terutama karena ikut sertanya campur tangan pemerintah dalam bidang ini" 18

Kemerosotan itu sendiri disebabkan oleh adanya pengarahan semua pendidikan, khususnya pendidikan agama

---

17 Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Propinsi - Daerah Istimewa Aceh, BAP3K, 1977/1978, hal.127. Lihat Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, hal.21

18 ..... , Sejarah Revolusi Kemerdekaan, Op.cit hal.27.

kearah kepentingan militer dan politik Jepang. Selain itu, juga karena kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya diantaranya kebijaksanaan ekonomi.<sup>19</sup>

Pada tahun 1943-1n, Jepang mulai memperketat kebijaksanaannya. Pengetatan ini bertolak dari adanya pemberontakan yang dilancarkan oleh ulama dari Cot Plieng Dayu, oleh Teungku Abdul Jalil, pemimpin Daya di Cot Plieng Dayu, yang dikenal dengan peristiwa Cot Olieng Dayu.<sup>20</sup>

Pengetatan ini berlanjut sampai dalam segala bidang untuk tidak memberi leluasa lagi bagi masyarakat Aceh dan mengembangkan dan memajukan kecerdasan dan kebebasannya.

Beginilah gambaran selintas suasana di Aceh dalam bidang politik pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Sementara dapat disimpulkan bahwa peralihan kekuasaan di Aceh tidak membawa kepada perubahan-perubahan yang berarti pada masyarakat Aceh. Terpisah dan berdiri sendirinya kepolisian di jaman Jepang dan dihimpun

---

19 Ibid., hal.26

20 Wawancara dengan Husin Yusuf, Yogya, 1986.

para pemuda masuk romusha mempersempit gerak dan kebebasan masyarakat. Semua ini dijalankan oleh Jepang untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai Asia Timur Raya, bukan untuk membantu rakyat Aceh mencintai tanah airnya.

Suatu peralihan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu setelah di bomnya kota Hiroshima dan Nagasaki tidak diketahui oleh pemimpin-pemimpin Aceh dan pemuda nya. Maka sewaktu diadakan rapat pemuda di Kuta raja (rapat ini diadakan atas saran Matsubushi). Pada rapat tersebut direncanakan, Mathsubushi dan S. Lino ( Atjeh Syutyokan) akan menyampaikan pidatonya. Saran yang disampaikan oleh Jepang tak luput dari tujuan-tujuan politisnya, yaitu ingin mendekati masyarakat Aceh, untuk membantu Jepang bila sekutu mendarat di bumi Aceh.

Setelah jadwal itu sudah sampai, kedua pemimpin tersebut tidak terlihat sama sekali. Ketidakhadiran kedua pemimpin Jepang tersebut menunjukkan atau memberi firasat pada yang hadir bahwa Jepang sudah angkat kaki dari Aceh.<sup>21</sup>

Selain itu juga memberi suatu stimulan kuat kepada para pemuda dan pemimpinnya untuk meraih kemer-

---

21 Wawancara dengan Husin Yusuf, Yogya, 1986.

dekaan. Daud Beureneh dan T. Nyak Arif pada kesempatan itu berpidato berapi-api, membakar semangat para pelajar. Setelah rapat di Kuta Raja diteruskan dengan rapat-rapat yang dihadiri oleh para pemuda, yang terdiri dari eks Gyu-Gun, Heih Toku betsyu, Keisatsutai, KNIL dan lainnya. Mayoritas dari pemuda-pemuda tersebut adalah dari jajaran PUSA (ada penjelasan tersendiri)<sup>22</sup>. Maka pada tanggal 27 Agustus 1945 disuatu ruang sentral hotel Kuta Raja dan dengan kebulatan tekad membentuk Angkatan Pemuda Indonesia, berkedudukan di Kuta raja.<sup>23</sup>

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

"Komandan	: Syammaun Gaharu
Kepala staff	: T.A Hamid Azwar
Sekretaris	: Husin Yusuf
Anggota-anggota	: Nyak Deh Rica, Said Usman, Said Ali, T.M Daud Samalanga T. Serung, Bachtiar Idham- T. Abdullah (PM), Saiman". <sup>24</sup>

Sebelum meneruskan Keterangan tentang API perlu disinggung disini, bahwa penyerahan Jepang pada Sekutu bukan berarti Jepang sudah tiada sama sekali di Aceh.

---

22 Wawancara dengan Husin Yusuf, Yogya, 1986.

23 Wawancara dengan Husin Yusuf, Yogya, 1986.

24 Muh Ibrahim, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Op.Cit, hal.177 dan 178.

Jepang masih menguasai sebagian daerah-daerah Aceh. Sejalan dengan berdirinya API berdiri pula barisan kelasykaran. Sedang API sendiri pada tanggal 12 Oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), dan menjadi pasukan resmi Pemerintah Indonesia.

Dengan kelahiran API pula (yang didominir oleh pemuda PUSA dan didorong oleh sesepuh PUSA), maka diadakan penyerangan-penyerangan di sekitar daerah - daerah Aceh yang masih dikuasai Jepang dan pengaruhnya.

".....timbullah perlawanan-perlawanan terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh untuk berusaha mengambil alih alat persenjataan dari tangan Jepang. Seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di :

1. Seumelium, pada tanggal 26 Nopember 1945.
2. Lhokngan dan Blang Bintang, pada tanggal 1-7 Desember 1945.
3. Biruen, pada tanggal 18 Nopember 1945.
4. Sibli, pada tanggal 22 Desember 1945.
5. Lhoseumawe, pada tanggal 18 Nopember 1945.
6. Kampung Juli dan Gelanggang Labo, pada tanggal 20 dan 22 Nopember 1945.
7. Krung Panjuoe, pada tanggal 24 Nopember 1945.
8. Kuala Simpang, pada tanggal 24 Desember 1945.
9. Kampung Kupak dan Bukit Matus, pada tanggal 25 Desember 1945.
10. Suak Timah, Peureumneue dan Teunom, pada tanggal 29 Nopember 45 sampai 22 Desember 1945, dan berbagai daerah lainnya."25

Dengan demikian lasykar-lasykar Aceh sudah mewujudkan cita-citanya tanpa harus bekerja dengan siapa pun, sebab harapan mencapai kemerdekaan dengan bantuan Jepang tidak mungkin terjadi. Dan pikiran seperti ini sudah terlintas di dalam bayangan mereka sewaktu Syu Tyoken S. Lino mengumpulkan mereka di tempat kediamannya, dan ia berkata :

"..... Apa boleh buat perang sudah usai dan damai, jadi Indonesia tidak dapat merdeka lagi".<sup>26</sup>

Pemimpin-pemimpin rakyat yang dahulu bekerja sama dengan Jepang dengan harapan ingin mencapai kemerdekaan Tanah Air, kini berbalik menyerang Jepang bersama rakyat dan mendirikan satuan-satuan lasykar untuk mengusir Jepang yang tidak bisa diajak kompromi, bahkan kehadirannya merugikan dan menipu masyarakat.

Kepergian Jepang bukan berarti perjuangan sudah selesai masyarakat dan para pemimpinnya (ulama) masih menghadapi kemungkinan datangnya Belanda II, karena dari sebagian golongan uleebalang berusaha mendatangkan atau mengharap datangnya Belanda ke Aceh yang kedua kalinya. Pembahasan tentang ini akan dikupas pada bab selanjutnya.

---

<sup>26</sup> ....., Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Aceh, Op.cit. hal.53

## B. Sosial Ekonomi

Daerah Aceh sebenarnya daerah yang sangat subur, Potensi tanahnya sangat baik sekali untuk ditanami padi dan lain sebagainya. Keadaan tanah yang demikian menyebabkan daerah Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Utara pekerjaan penduduknya adalah bertani, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Tercatat di dalam tahun 1938 dan tahun-tahun sebelumnya Aceh sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Tetapi pada tahun 1939 tercatat bahwa Aceh selain dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya - juga dapat mengekspor gas ke daerah lain, Pada tahun tersebut terdapat kelebihan ekspor sebanyak 5600 ton beras.

Angka surplus kebutuhan beras (pangan pokok) ini makin bertambah pada tahun 1940, 1941, 1942. Kenaikan tersebut bisa dilihat pada ekspor beras ke luar daerah pada tahun tersebut, 24.000 ton beras pada tahun 1940, 36.000 ton pada tahun 1941, dan 45.000 ton pada tahun 1942.<sup>27</sup>

Adapun daerah-daerah yang mendapat beras dari Aceh diantaranya :

---

<sup>27</sup> Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Op.cit., hal.144.

1. Beras dari Aceh Utara dan Idia di Aceh Timur dieksport ke Sumatra Timur yang diangkut dengan menggunakan kereta api.
2. Beras dari Gayo dan Alas juga dieksport di Sumatra Timur, diangkut dengan menggunakan oto barang, karena keadaan tanahnya tidak memungkinkan untuk dibuat kereta api.
3. Aceh Barat mengeksport berasnya ke Sumatra Barat dengan menggunakan angkutan laut.<sup>28</sup>

Sejak masa gubernur Van Aaken (1933-1963) telah diadakan usaha sekuat-kuatnya untuk mengintegrasikan - produksi beras, baik dengan menggunakan seleksi bibit dan pengadaan irigasi, maupun dengan cara memperluas - areal persawahan, bekerja sama dengan dinas pertanian rakyat.<sup>29</sup>

Disamping bersewa yang merupakan pekerjaan mayoritas rakyat Aceh dan merupakan sumber penghasilan utama, masyarakat Aceh juga menjalankan usaha perkebunan rakyat.

Tercatat di Aceh Utara banyak terdapat perkebunan pinang. Bahkan pada tahun 1939 Aceh Utara sudah da-

---

28 Ibid., hal.145

29 Ibid., hal. 144-145.

pat mengekspor sebesar 25.000 ton dengan pukul rata F. 5/100 Kg<sup>30</sup>. Sedang di Aceh Timur banyak perkebunan - karet rakyat, dan juga di daerah Aceh lainnya. Bila ditaksir jumlah expornya kira-kira 1,3 juta kg, dengan harga rata-rata E. 29,28 kg per 100 kg. Dan juga kopra (yang merupakan penghasilan rakyat Aceh) dapat diekspor sebesar 12.150 ton pada tahun 1939.

Jumlah eksport pada tahun 1939 ke Sumatra Timur 8.786 ekor sapi dan 7.069 ekor Kerbau.<sup>31</sup>

Kembali kepada masalah pertanian, masyarakat Aceh masih berorientasi pada ekonomi agraris tradisional<sup>32</sup> sebagaimana masyarakat Jawa di pedalaman pada waktu itu.

Adapun faktor-faktor jalannya perekonomian di Aceh pada waktu itu disebabkan oleh :

1. Norma agama, sementara orang berkeyakinan bahwa mendapatkan harta dengan tidak sah itu membawa pada malapetaka, mungkin menimpa si-pemilik harta atau keturunannya. Keyakinan se

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid, hal.145

<sup>32</sup> Al Fian ed, Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, LP3ES, Jakarta, Desember 1977, hal.110.

perti ini menyebabkan mereka di dalam perekonomian terlepas dari cara-cara yang tidak sehat.

2. Norma adat, sementara di Aceh seorang penganggur atau pemalas (disebut ben 0)<sup>33</sup> dianggap manusia yang tercela. Dan bila ada pemuda seperti itu sulit untuk mempersunting gadis Aceh, karena menerima pemalas juga tercela. "Dengan rasa malu hal demikian telah memperkecil jumlah pengangguran di pedesaan Aceh besar dan lainnya."<sup>34</sup>

Sehingga di Aceh besar tidak banyak pengangguran, selain disebabkan oleh banyak calon tenaga kerja juga karena tidak adanya kepercayaan para pemilik alat-alat produksi kepada mereka yang sudah dikenal sebagai pemalas.

Kedua faktor di atas mendorong kepada setiap individu dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyetatkan suasana perekonomian masyarakat Aceh.

Apakah kelebihan dan kesurplusan hasil bumi di daerah Aceh sudah cukup menunjukkan bahwa masyarakat Aceh makmur hidupnya?. Apakah laporan-laporan eksport

---

33 Ibid, hal.111

34 Ibid,

beras, karet dan hewan potong ke daerah lain menunjukkan taraf hidup masyarakat Aceh sudah baik?.

James C. Scott dalam hal ini mengatakan, kekuasaan tatanan kolonial di daerah pedesaan mengungkapkan dirinya justru dalam wujud kemampuan untuk menstabilkan pendapatnya atas kerugian rakyatnya.<sup>35</sup>

Kalau di atas dikatakan bahwa daerah Aceh termasuk daerah agraris berarti masyarakat tani dan pemilik tanah pertanian disana berkepentingan dalam laju dan lesunya perekonomian di daerah Aceh. Penjajahan di Aceh menyentuh langsung kepentingan pokok bagi masyarakat tersebut. Demikian ini bukan saja di Aceh tetapi hampir di seluruh daerah-daerah di Indonesia merasakan demikian.

Misalnya di Madiun, hingga menyebabkan petani-nya sama-sama turun jalan dan memberontak yang pada pokoknya alasan-alasannya sama, di dalam apa yang di kenal peristiwa Pulung.<sup>36</sup>

Penulis kira pendapat James S. Scott merupakan satu kajian tentang kebenaran yang nyata dan metupakan

---

<sup>35</sup> James S. Scott, Moral Ekonomi Petani, LP3ES, Jakarta, 1977, hal.140. lihat juga Karto Dirjo, Peasant Movement, bab II.

<sup>36</sup> Ibid, hal.144

gambaran taktik Belanda yang berhasil di dalam memperdaya masyarakat tani Indonesia. Taktik inilah yang menyebabkan Belanda bertahan lama dalam menjajah.

Bila kita bandingkan dengan kebijaksanaan Jepang dalam perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, pada pokoknya sama, yaitu merampas hak milik bangsa lain. Tetapi cara-cara yang di gunakan berbeda. Perbedaan ini terlihat dalam ketergesaan Jepang di dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang menyebabkan timbulnya tantangan-tantangan yang berupa pemberontakan-pemberontakan terhadap Jepang iti sendiri. Lain halnya dengan Belanda dalam waktu yang sangat lama baru mengadakan perubahan-perubahan. Tindakan Jepang seperti ini memang beralasan di mana negaranya sedang mengadakan agresi militer di Asia Timur, yang bertujuan membentuk negara Asia Timur Raya, sudah tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar., maka dengan demikian setiap jajahan Jepang selalu mengalami hal yang demikian. Pemerasan Jepang terhadap hasil bumi masyarakat Aceh bisa di lihat pada tingginya angka ekspor beras pada tahun 1942.

Pada mulanya masih nampak sikap Jepang yang baik, yaitu adanya usaha memajukan kehidupan rakyat. Sikap seperti ini bertendesi politik, untuk menarik simpati rakyat dalam mensususkan perang Asia Timurnya.

"Dari sekian banyak rencana yang akan dijalankan dibidang pertanian itu, hanya satu yang pernah di laksanakan dalam hal meningkatkan produksi pertanian rakyat. Pemerintah Jepang mengerahkan rakyat secara gotong royong membersihkan saluran-saluran air yang telah ada di persawahan persawahan, mereka tidak pernah berusaha membuka saluran-saluran air yang baru. Dalam melakukan gotong royong ini dikerahkan rakyat dengan paksa dan dipimpin langsung oleh orang-orang Jepang sendiri. Bila diperhatikan kepada konsepsi yang telah di sebutkan itu tentunya Jepang dengan dana yang tersedia padanya akan membuka irigasi-irigasi yang baru, maupun perbaikan irigasi yang telah ada, bukan dengan sistem seperti yang di praktekkan ini"<sup>37</sup>

Praktek-praktek ini semestinya sangat kontras dengan perkataan dari S. Matshubuti, yang dapat disimpulkan dari pembicaraannya bahwa urusan pertanian, pengairan, kerajinan dan lainnya. Dalam hal pertanian pemerintah Jepang akan mengusahakan pengairan yang baik dan memperluas lahan persawahan untuk kemakmuran.<sup>38</sup> Ucapan ini tidak teralisir bila dikerjakan, tetapi bukan untuk kemakmuran rakyat.

Dari sekian melapetaka yang diderita oleh masyarakat Aceh, ialah adanya BDK dan sistem operasinya. Di-

---

<sup>37</sup> Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit, hal.31

<sup>38</sup> Ibid, hal.30

bentuknya BDK oleh Jepang untuk menampung hasil bumi dan dengan masyarakat Aceh, kemudian juga sebagai penyalur, dan juga kehadirannya sebagai pengontrol perekonomian rakyat. Dengan demikian pengontrolan secara ketat ini mempersempit ruang gerak dan membendung arus perkembangan perekonomian masyarakat.

"Tidak jarang padi rakyat terus di kumpulkan langsung dari sawah setelah panen. Pengumpulan secara paksa ini dilakukan dengan dalih untuk menjaga kemakmuran bersama"<sup>39</sup>

Dalam masalah perdagangan banyak menyebabkan para pedagang frustrasi dan tidak melanjutkan usahanya.

"Para pedagang bumi putra walaupun masih melakukan kegiatan-kegiatan mereka di bidang perdagangan namun tidak dapat mengembangkan usaha-usaha mereka. Tidak kurang di antara mereka pada zaman ini (Jepang) meninggalkan usaha-usaha dagang, ...<sup>40</sup>

Hasil bumi maupun lainnya yang masuk ke BDK, bukan sama sekali tidak mendapat imbalan, tetapi imbalan atau harga barang atau lainnya yang masuk BDK di tentukan oleh Jepang sendiri, dimana harga tersebut di bawah harga minimum. Bila hasil bumi atau lainnya tidak di

---

39 Ibid, hal.32

40 Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Istimewa Aceh, hal.156 -

serahkan kepada BDK, maka sipemilik akan mendapat suatu siksaan fisik dari pemerintah.

Pada masa Jepang di Aceh, bukan hanya dalam hal sandang dan pangan yang sulit, tetapi dalam penyediaan-minyak yang digunakan untuk penerangan dan lainnya sangat sulit. Kesulitan tersebut di sebabkan instruksi pemerintah untuk tidak menggunakan minyak terlalu boros agar kepentingan militer yang banyak menggunakan minyak terpenuhi.

"Lembaga-lembaga pendidikan agama kini mengalami hidup yang tidak menentu lagi. Sejak dari pendidikan agama di rumah tangga Surau dan Masjid yang sebelumnya berjalan dengan lancar kemudian berjalan dengan tersendat-sendat, karena kesulitan memperoleh minyak lampu, sebagian dari dayah-dayah di seluruh Aceh telah menjadi sepi bahkan ada yang kosong".<sup>41</sup>

Kebijaksanaan ekonomi Jepang ini sudah mulai mempengaruhi bidang-bidang yang sensitif dari apa yang dimiliki oleh masyarakat yaitu lajunya bidang pendidikan agama.

Roda pengangkutan hasil bumi dan barang dagangan pun di kuasai oleh Jepang. Jadi Jepang pada perkembangannya sudah menjajah daratan dan lautan Aceh, khusus

---

<sup>41</sup> Ismuha, Pendidikan Agama Di Aceh, Kertas Prasarana Diskusi MSI Aceh, 1977, hal.11.

dalam kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan perekonomian pada waktu itu macet dan mundur kebelakang, karena kebutuhan kepentingan masyarakat yang esensial sudah di hilangkan kegunaannya.

"Alat perhubungan ini dipergunakan sebagian besar untuk membahan-bahan amunisi dan lain keperluan perang. Walaupun ada/terdapat barang-barang konsumsi yang di angkut dengan mempergunakan alat perhubungan, itu semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan militer"<sup>42</sup>

Demikianlah keadaan perekonomian di Aceh, dimana Jepang berlangsung. Maka setelah keberangkatan Jepang dari Aceh, karena di bomnya kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Keberangkatan Jepang itu menjadikan perekonomian di Aceh membaik sedikit demi sedikit. Secara otomatis badan-badan yang dulu sempat menjadikan para pedagang frustrasi di tiadakan. Begitu juga kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan yang pernah dijalankan di hapuskan.

### C. Ulama Sebagai Elite Tandingan

Sebelum membicarakan Ulama sebagai elite tanding

---

<sup>42</sup> ....., Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Op.Cit, hal.33

an, perlu kiranya disinggung dahulu tentang uleebalang sebagai elite baru.

Uleebalang yang merupakan tipe kepemimpinan anarkhis berkuasa secara terun temurun dan mempunyai hak otonom di dalam mengurus daerah kekuasaannya, mulai zaman kesultanan di Aceh hingga pada zaman pra Revolusi fisik. Tentang masalah kekuasaan ke dua pemimpin tersebut sudah di jelaskan secara singkat pada halaman pertama.

Sejak penyerahan kekuasaan sultan Aceh pada Belanda pada tahun 1873, mulai terlihat adanya kerenggangan antar ke dua pemimpin tersebut, walaupun tidak menyeluruh. Makin lama makin membesar kerenggangan hingga pada abad ke XX.

Diberinya Uleebalang kedudukan di bidang politik, ekonomi dan lainnya, dan disudutkannya ulama dalam sosial agama yang ruang geraknya sudah dibatasi, kebijaksanaan seperti ini makin melempar ulama pada sudut tidak menentu dan berpengaruh pada masyarakat atas dan tidak dapat mengontrol urusan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Belanda dengan visi politik atas dan politik Islam Belandanya ingin menciptakan kaum elite baru yang penurut<sup>43</sup> untuk mempertahankan penjajahannya,

---

<sup>43</sup> Alfian, Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh, Cp.Cit hal.208.

Pemikiran seperti ini karena Belanda (atas saran Snouk Hurgronje, penasehat Belanda dalam urusan umat Islam di Indonesia) beranggapan bahwa kebudayaan dan sistem nilai barat, dalam hal ini yang dimaksudkannya ialah kebudayaan dan sistem nilai kebudayaan barat, adalah lebih tinggi atau superior kualitasnya jika dibandingkan dengan Islam dan tradisi atau kebudayaan Indonesia. Pendirian inilah yang di gunakan sebagai Politik Etisnya.<sup>44</sup>

Selain itu juga beranggapan bahwa perlawanan-perlawanan yang distimulir oleh Islam dapat diselesaikan dengan mengorbitkan kaum bangsawan, dan teuku-teuku sebagai kaum elite yang diingini.

Untuk membentuk kaum elite ini Belanda membentuk sekolah-sekolah terbatas jumlahnya dan jumlah muridnya, terbatas pula untuk anak bangsawan dan teuku. Sudah jelas, produk dari visi ini adalah manusia berfikiran sekuler dan kontras dengan sistem nilai yang ada. Dan secara relatif mutlak menganggap siste, nilai lama sebagai suatu faktor yang menghambat kemajuan atau pembaharuan.<sup>45</sup>

Keterbatasan sarana ini menggugah ulama untuk

---

44 Ibid, hal.207

45 Ibid, hal.208

membangun sarana-sarana pendidikan yang sistemnya modern sebagai tandingan, untuk memajukan kecerdasan masyarakatnya.

Bentuk Dayah yang dahulu merupakan satu - satunya sarana dalam pendidikan di Aceh tetap dilestarikan, hanya bentuk dan sistem pengajarannya yang di perbaharui dan di tambah apa yang perlu di tambah,

Madrasah merupakan bentuk awal dari pembaharuan pendidikan tersebut. Di dalam madrasah tersebut selain sarananya disamakan dengan sekolah-sekolah Belanda, juga sebagian kurikulum sekolah Belanda yang dianggap perlu di ajarkan di sana.

Antara keduanya (bentuk sekolah) ini sudah jelas berbeda. Perbedaan ini terletak pada tujuannya yang menyebabkan ada perbedaan pula dalam sebagian kurikulumnya.

Realisasi dari pembaharuan sistem ini dibangunnya madrasah di Mata Gelumpang Dua di Aceh Utara dengan madrasah Al Muslimnya.<sup>46</sup>

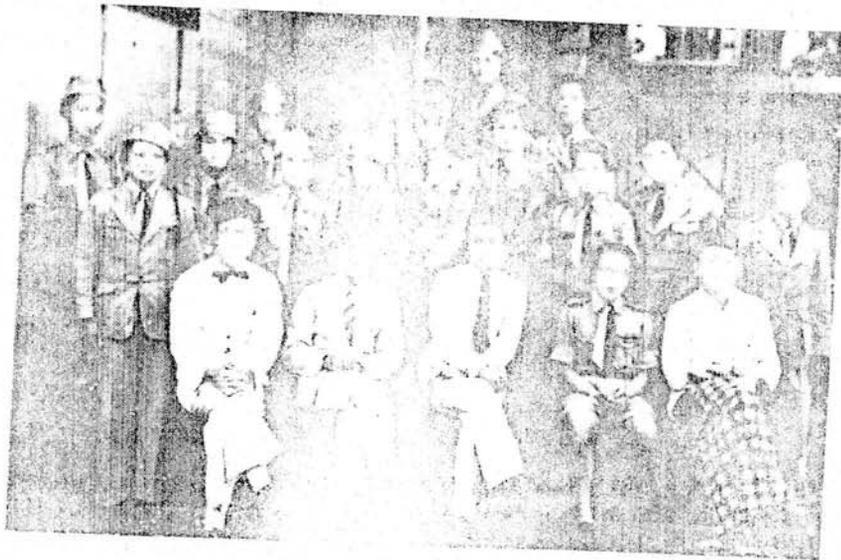
Di sini timbul pertanyaan mengapa kaum ulama hanya menerima sebagian dari pembaharuan dan apriori terhadap

---

<sup>46</sup> Lebih luasnya untuk mengetahui sekolah - sekolah yang dibangun dengan sistem baru, Lihat Taufiq Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, hal.1-35.



Perayaan meresmikan pembukaan Normal Islam PUSA di Bireuen, 27 Desember 1939. Duduk memegang tongkat adalah Tgk. Mhd. Daud Beureueh. Keluaran Normal Islam ini merupakan kader pelaksana daripada cita-cita pembaharuan Daud Beureueh.



Pengurus Besar KI (Kasysyafatul Islami), Kepanduan PUSA bersama para pemimpin KI dari seluruh Aceh (1941). Duduk dari kanan ke kiri: A. Bakar Adamy, Hadi Rafiuddin, T. Muhammad, M. Nur El Ibrahimy dan R. Murdani. Berdiri tampak antara lain A. Hasjmy, bekas gubernur Aceh (tengah-tengah), A.M. Namploh, bekas Wk. Gubernur Aceh (nomor tiga dari kanan) dan Tgk. Ahmad Abdullah (nomor tiga dari kiri).

sebagian yang lain, atau mereka menerima pembaharuan disatu segi dan mempertahankan sistem nilai lama disegi lain?. Bila dilihat pada masa sekarang maka sikap yang demikian sangat menguntungkan. Paling tidak sebagian yang di pertahankan itu dapat memberikan suatu kekuatan tertentu bagi masyarakat, yaitu dapat bertahan berbagai tantangan, melawan penjajah, dan dominasi bangsa lain.<sup>47</sup>

Bagaimana Jepang (pada masa kini) begitu maju, sedang disisi lain terlihat sistem lamanya masih melekat?. Dan bagaimana dengan Singapore yang sekarang sedang mencari sistem nilai lama yang hilang?.

Setelah berdirinya POESA (lihat bab III) ulama - sebagai kaum elite tandingan benar-benar menandingi dengan berdirinya "Normal Islam Institutut" di Biruen<sup>48</sup> Dan pengajar utamanya M. Nur Al Ibrahim dari lulusan Al Azhar Cairo dan Mr Muhammad, tamatan sekolah tinggi hukum di Jakarta (RHS). Mr. Muhammad mengajar pada mata pelajaran umum, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris.<sup>49</sup>

Kaum elite tandingan ini bila dilihat dari semua tindakannya berorientasi pada masyarakat bawah dan me -

---

47 Al Fien, Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh, Op sit, hal.202

48 Wawancara dengan teungku Husin Yusuf, Yogja 1986.

49 Al Fian, Segi-segi Sosial Masyarakat Aceh, Op cit, hal.214.

nengah Aceh, dan adanya hubungan langsung antar mereka dalam usaha mempertahankan masyarakat ini menambah kepercayaan dan ketergantungannya pada ulama dan kebenciannya pada Belanda.

Adanya dualisme pada diri ulama-ulama yang ada dalam POESA sewaktu Jepang di Aceh adalah suatu kewajaran, tidak bisa di katakan sebagai suatu perpecahan pada tubuh organisasi tersebut. Di satu pihak, ulama duduk di kursi pemerintahan, untuk mengurus masalah pendidikan dan pengadilan Islam. Di lain pihak mereka bergerilya menentang kebijaksanaan Jepang dalam politik dan ekonomi. Dualisme ini terjadi karena adanya tujuan yang berbeda. Di satu pihak ingin menyelamatkan keyakinan masyarakat dan lainnya lagi membantu masyarakat dalam hal kebebasan berpolitik dan ekonomi. Protes-protes ulama ini bisa dilihat dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang di kenal dengan peristiwa Bayan.<sup>50</sup> peristiwa Pandraih dan perang Bayu.<sup>51</sup>

Bila dilihat lembaran fakta sejarah di atas, dapat di simpulkan bahwa ulama sebagai elite tandingan

---

<sup>50</sup> Lihat Prof.DR.Ismail Sunny, SH.MCL. (Editor), Bunga Rampai Tentang Aceh, hal.69.Lihat Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah,hal.72 - 78.

<sup>51</sup> Lihat Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah Istimewa Aceh, hal.168 - 174.

benar-benar berhasil dan menggeser kekuatan dan impian Belanda maupun Jepang.

Masalah ulama ini akan di lanjutkan lebih terperinci lagi pada sub bab selanjutnya dalam hubungannya dengan Belanda, Jepang dan elite baru yang dibentuk Belanda dan sebagai alat pemerintah jajahan.

#### D. Persatuan Ulama Seluruh Aceh.

Sebelum membicarakan tentang Persatuan Ulama Seluruh Aceh, dalam tulisan ini akan dipaparkan terlebih dahulu pengertian ulama pada masyarakat Aceh, serta tingkatan-tingkatan klasnya.

Masyarakat Aceh menyebut seseorang sebagai ulama dilihat dari kepergiannya dari gampong (tempat tinggal masyarakat hukum terkecil dengan ikatan terdayah (pesantren); kedua, rantauannya dari dayah ke dayah yang lain dan ketiga pengetahuan agama yang dimilikinya.<sup>52</sup>

Menurut James T. Siegel dalam bukunya 'The Rope of God', ia mengukur status ulama hanya dari segi kepergiannya ke suatu dayah. Disini James T. Siegel tidak menyebutkan berapa lama seseorang di dalam menuntut ilmu di dayah sehingga pantas untuk disebut dengan se-

---

<sup>52</sup> Soeyatno, Sejarah Sosial Masyarakat Sibreh, Aceh Besar, dalam buku 'Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh' Alfian (Edt.), LP3ES, Jakarta, 1977. hal. 57

butan ulama. Kiranya tulisan Soeyatno dalam hal ini lebih benar dan jelas di dalam memberikan ukuran seseorang dikatakan ulama di masyarakat Aceh.

Untuk menyebut seseorang sebagai ulama tidak dapat dilepaskan dari penyebutnya, yaitu masyarakat. Dus, Pengakuan masyarakat atas status seseorang dikatakan sebagai ulama itu sangat menentukan.<sup>53</sup>

Wal hasil, ketiga unsur tersebut di atas baru merupakan tahap awal, sedang tahap kedua adalah tahap pengujian yang menentukan seseorang dianggap sebagai ulama atau tidak oleh masyarakatnya. Tahap pengujian itu terletak pada pengamalan ilmu ulama tersebut di tengah-tengah masyarakatnya.

"..... sebab masyarakat Aceh beranggapan, mengetahui saja tanpa mengamalkannya merupakan suatu yang cela, bahkan tidak pantas mendapat penghormatan dari masyarakat, sebaliknya akan mendapat cercaan".<sup>54</sup>

Ulama di Aceh mempunyai tingkatan - tingkatan atau klas-klas itu juga ditentukan oleh masyarakat sekelilingnya. Sudah jelas untuk menentukan klas-klas mereka tidak semudah menentukan ulama sebagaimana di atas.

---

<sup>53</sup> Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, CV. Rajawali, Jakarta, 1983. hal. 18

<sup>54</sup> Ibid.

Penentuan klas-klas ini, khususnya klas yang tertinggi, selain tiga unsur di atas sebagai tolok ukur, juga memerlukan proses yang panjang dan mempunyai sumbangan yang besar pada masyarakatnya. Jadi peranan ulama pada masyarakatnya menentukan status ulama itu sendiri.

"Seorang ulama yang terbesar berhak memakai sebutan Teungku Cik. Seorang ulama menengah memakai sebutan Teungku di Balai. Seorang ulama rendah memakai sebutan Teungku".<sup>55</sup>

Sukarnya seorang ulama untuk mendapat sebutan teungku chik disebabkan sulitnya proses untuk menuju ke sana. Selain dilihat dari kebiharan ilmunya, peranan dan keberhasilannya dalam mengangkat harkat masyarakat-Aceh dalam segala bidang, baik duniawi maupun ukrawinya sehingga di dalam wilayah VII mukim baet \* hanya terdapat tiga ulama dengan sebutan teungku chik.

"Ketiga ulama tersebut di atas, yaitu Teungku chik di Lamkrak (Dayah Lamkrak), Teungku chik Lambirah (Dayah Lambirah) dan Teungku chik di Lam Jabat (Dayah Jeula)".<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Soeyatno, Sejarah Sosial Masyarakat Sibreh, - Aceh Besar, Op.cit., hal.57

\* Wilayah kerjasama antar gampong yang dalam perkembangannya cenderung menjadi wilayah administratif.

<sup>56</sup> Ibid.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat yang arusnya mulai menerjang dunia Timur yang sedang tidur. Kemudian di jawab dengan apriori oleh sebagian besar ulamanya. Pada akhirnya, ulama itu sendiri tertinggal jauh dan terisolir dari percaturan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang makin lama makin menunjukkan dominasi Barat dalam masalah ini. Hal ini menyebabkan kaum ulama hanya menekuni bidang hukum dan ketauhidan saja.

Dari perkembangan di atas, maka pengertian makin menyempit yaitu orang-orang yang hanya mampu dalam bidang ketauhidan saja dan tidak tahu tentang politik, sosial, kebudayaan dan lain-lain.

Masyarakat Aceh pada awalnya memandang ulama pada pengertian pertama, yaitu orang yang cakap dalam bidang ketauhidan dan kemasyarakatan, identik dengan sebutan warosatul ambiya'.<sup>57</sup>

Anggapan masyarakat Aceh di atas terhadap ulama nya merupakan kesimpulan historis dari pengamatan dan pengakuan mereka setelah sekian lama ulama berkiprah di dalam deretan sejarah masyarakat Aceh, sehingga men dapat kedudukan yang terhormat di hati masyarakatnya.

---

<sup>57</sup> Lihat Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, Op.Cit., hal.18

a. Peranan Ulama di Aceh.

Islam masuk ke Aceh berbilang waktu lamanya, sejak abad Thijriyah. Lamanya waktu adanya Islam di Aceh banyak mempengaruhi corak kebudayaan masyarakatnya. Pengaruh itu baik pada cara berfikir, norma-norma dan dalam cara kehidupan mereka sehari-hari.

Perlu diketahui di sini, bahwa sebelum kedatangan agama Islam, agama sudah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh. Tetapi agama Islam dengan lama waktu penyebarannya dapat mempengaruhi masalah-masalah yang esensial, yaitu cara berfikir, tolok ukur baik dan buruk, hukum adat dan tatanan-tatanan kehidupan lainnya. Jika demikian tidaklah tepat pendapat Snouck Horgonye yang mengatakan :

"Islam masuk ke Aceh terlalu tergesa-gesa yang mengakibatkan ketidak berhasilannya mempengaruhi kebudayaan Aceh secara menyeluruh. Buktinya ia menunjukkan cara-cara berpakaian wanita Aceh yang dikatakan mirip dengan wanita wanita Hindu".<sup>58</sup>

Memang tidak ada suatu kebudayaan yang dapat hilang sama sekali dalam waktu yang singkat. Tetapi

---

<sup>58</sup> Snouck Horgonye, *De Atjenhers*, I (1983), dalam bukunya Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, CV. Pustaka, Jakarta, 1985, hal.35.

adilkah hanya karena masalah pakaian wanita yang belum terpengaruhi, kemudian secara cepat Snouck HoHongonye-berkesimpulan bahwa Islam tidak berhasil mempengaruhi-kebudayaan di Aceh?. Sekali-kali itu hanyalah kesimpulan yang tidak didasari data yang memadai.

Perubahan dari pengaruh Hindu kepada Islam, tidaklah dapat dikesampingkan dalam masalah ini ulama sebagai pemeran penting, yang secara aktif berkiprah marubah kehidupan masyarakat Aceh mulai adanya Islam di Aceh hingga abad ke XX-an ini.

Peranan ulama tersebut selain bertujuan menggeser kebudayaan Hindu, juga mempertahankan Aceh dan masyarakat terhadap ancaman dari luar. Tujuan yang melebar ini mulai dirasakan oleh mereka setelah adanya ancaman agresi Belanda ke wilayah Aceh.<sup>59</sup>

Peranan ulama dalam mempertahankan Aceh dari serangan musuh tersebut sangat beralasan, yaitu supaya masyarakat Aceh hidup dalam keadaan tentram dan Islam tetap tidak tergeser oleh kebudayaan baru yang dibawa oleh musuh (Belanda) ke dalam wilayah Aceh.

Peranan Ulama itu dapat dilihat dari beberapa bentuk cara. Di antaranya bentuk peranan fisik dan

---

<sup>59</sup> Lihat Paul Van 'T Veer, Perang Aceh, PT. Graffiti Press, Jakarta, 1985. hal.

fikiran yang dituangkan dalam hasil karya mereka, dalam misi untuk mendorong dan membantu masyarakat dalam berbagai kesulitan.

Kala sebagian besar wilayah Aceh sudah dikuasai oleh Belanda, yang disebabkan oleh ketidak efektifan para uleebalang (hulubalang yang mendapat hak otonom dari raja untuk mengurus wilayah administratifnya sendiri-sendiri) memimpin masyarakat Aceh, kehadiran peranan ulama dalam keadaan seperti ini sangat diharapkan. Ketidak beresan uleebalang dalam memimpin masyarakatnya itu akhirnya membawa Aceh kepada kekalahan dalam melawan Belanda.

"Kekalahan tersebut memberi pengaruh yang parah dalam kehidupan sosial dan menimbulkan perasaan putus asa dalam hati para pejuang dan rakyat. Apalagi pada bulan oktober 1873, para uleebalang (sebagian besar) menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang isinya menyatakan keadaulatan kolonial Belanda pada seluruh wilayah-Aceh".<sup>60</sup>

Setelah perjanjian itu ditandatangani oleh para uleebalang yang tidak efektif memimpin masyarakatnya itu, Panglima agresor, Letnan Jenderal J. Van Swieten mengirim kawat kemenangan kepada Gubernur Jendral Loudon

---

<sup>60</sup> Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, .... Medan, I, 1961 hal 19.

di Jakarta. Kawat kemenangan itu berbunyi :

"24 Januari kraton is ons stop koning en veder - land gelukge wenschtmet deze over winning (24 Januari kraton sudah di tangan kita, titik raja dan tanah air diucapkan selamat atas kemenangan ini"<sup>61</sup>

Dalam keadaan seperti di atas, ulama di Lamsie, Aceh Besar mengadakan rapat rahasia yang dihadiri oleh Teungku Abdul Wahab Tanoh Abee, para ulama di daerah Lamseo dan juga Teuku/Teungku Panglima Polem beserta sebagian kecil dari uleebalang yang belum menyerah ke - pada kompeni Belanda.

Dalam rapat rahasia di atas Teungku Abdul Wahab Tanoh Abee menegaskan bahwa tenaga perjuangan belum hancur seluruhnya. tetapi yang kurang pada mereka ada - lah kesucian batin dan kekuatan iman. Di dalam rapat itu ia menghimbau kepada segenap uleebalang yang hadir untuk menyucikan batin mereka, yaitu memerangi hawa nafsu sebelum menghadapi peperangan yang lahir. Penghi - bauan Teungku Abdul Wahab itu secara lengkap sebagai berikut :

"Sebelum kita memerangi musuh lahir, perangilah - musuh batin dahulu, yaitu hawa nafsu. Harta rak yat yang ada pada kita masing-masing yang di

---

<sup>61</sup> A. Hasymi. Hikayat Perang Sabi Menjiwai Pe - rang Aceh Lawan Belanda, Firma Pustaka Faraby, Banda Aceh, 1971. hal. 37,

ambil karena hawa nafsu, serahkanlah kembali dengan segera. Janganlah rakyat selalu terania - ya.

Tegakkanlah keadilan di tengah tengah kita ter - lebih dahulu sebelum kita tegakkan keadilan pada orang lain. Dari itu tobatlah dahulu, wahai teuku, sebelum mengajak rakyat melawan kompeni. Kalau tidak juga dikembalikan harta rakyat yang diambil dengan jalan yang tidak sah, yakinlah - rakyat akan membelakangi kita dan kita akan tersapu bersih dari Aceh ini, melebihi yang sudah-sudah. Kalau yang saya sudah-sudah. Kalau yang saya minta teuku penuhi, maka saya bersama teuku teuku ke medan perang. Bila tidak, saya dan murid-murid saya jangan dibawa serta....."62.

Nasehat Teungku Abdul Wahab Tanoh Abee ini di kuatkan oleh Teuku Panglima Polem, yang menganjurkan - agar semua uleebalang memperhatikan apa yang telah di bicarakan dan dihibau oleh Teungku Abdul Wahab Tanoh Abee di atas, serta menganjurkan agar semua uleebalang-kembali ke ajaran Allah.

Rapat rahasia di atas merupakan langkah para ulama yang pertama, yaitu untuk menyadarkan para uleebalang, karena keputusasaan pada hati para pejuang dan rakyat di dalam membantu para uleebalang tersebut di sebabkan oleh sikap mereka yang keterlaluhan dalam mem -

perdaya masyarakat. Kemudian dari sikap itu hilanglah kepercayaan masyarakat kepada para uleebalang. Maka tepatlah rapat itu diadakan dengan mengikut sertakan para teuku (uleebalang).

Langkah selanjutnya, Ulama di Lumbata mengadakan rapat/musyawarah yang membicarakan kerjasama antara teuku dan teungku dan membicarakan ketentuan terhadap rakyat akan wajib jihad melawan kompeni.

"Atas dasar wajib jihad yang diikrarkan bersama dalam musyawah tersebut, maka para ulama menjadi aktif dan mengambil peranan penting, baik sebagai pemimpin perang maupun sebagai pengawas koordinasi perlawanan total rakyat terhadap Belanda".<sup>63</sup>

"Ketentuan-ketentuan terhadap rakyat umum, menurut keputusan musyawarah itu, ialah :

1. Sifat Jihad, rakyat yang diwajibkan memanggul senapan atau kelewang (tegasnya bertempur) - adalah mereka yang sudah menyatakan untuk ambil bagian langsung.
2. Rakyat diwajibkan gotong royong untuk segera memperbaiki masjid yang rusak akibat perang supaya kewajiban ibadah tetap terpelihara.

---

63 Muh. Said, Aceh Sepanjang Abad, Op.Cit, hal.461

3. Rakyat diwajibkan gotong royong untuk bersama sama mengatasi akibat perang.
4. Dalam masa perang dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan sukaria yang tiada bertalian dengan agama, seperti seudati dan yang seperti itu.
5. Setiap yang membutuhkan bantuan, wajib diberi bantuan oleh penduduk, terutama jika mereka membutuhkan pemondokan dan persembunyian.
6. Apabila diperlukan untuk membikin benteng (kota), rakyat diwajibkan gotong royong.
7. Ulama setempat berwenang memberikan bantuan - dan / atau menerima pengaduan rakyat di dalam mengatasi yang dideritanya."<sup>64</sup>

Karena di setiap daerah di wilayah Aceh mengalami pergolakan atau perlawanan terhadap Belanda, maka dibentuklah badan kerjasama informasi antara daerah. Badan informasi antara daerah ini disebut dengan Dewan Delapan, yang berkedudukan di Penang dan diketahui oleh Teuku Raja yang tugasnya menjalankan kegiatan diplomasi.

Suatu contoh, delegasi dari gunung Biram mengemukakan kegawatan yang sedang melanda Aceh Besar, dan

---

<sup>64</sup> A. Hasymi, Hikayat Prang Sabi Menjiwai Perang Aceh Lawan Aceh, Op.cit, hal.39.

kekuatan kompeni makin diperbanyak dan diperkuat, maka atas dasar informasi itu para ulama mengadakan rapat di Pidie dan akhirnya memutuskan untuk membantu perang ke Aceh Besar dengan mengirim sejumlah ulama di bawah pimpinan Teungku Tjihik Tjut, yaitu Teungku Tjihik di Tiro.<sup>65</sup>

Kerjasama ini makin memperkuat posisi masyarakat Aceh di dalam melawan Belanda. Dimana sebelumnya di kala perjuangan rakyat masih secara langsung di bawah pimpinan uleebalang tidak pernah terjalin kerjasama sebagaimana yang dikoordinir oleh Teungku Abdul Wahab Tenoh Abee dan para ulama lainnya.

Setelah tapuk kepemimpinan dipegang oleh Teungku Tjihik di Tiro kerjasama mereka di dalam mengkoordinir masyarakat/pejuang-pejuang makin terkontrol lagi. Ia selalu mengontrol keadaan pasukan pada setiap daerah di wilayah Aceh. Selain itu, ia juga membuat markas besar di Mereu, dekat Indrapuri. Disanalah Teungku Tjihik di Tiro mengirim delegasinya ke pelosok daerah wilayah Aceh untuk menemui para ulama dan pemimpin rakyat, dan mengatur strategi ocoerangan dan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu mempersiapkan kader- kader

---

65 Ibid, hal.41

yang ditugaskan untuk membakar semangat rakyat melawan Belanda maupun membantu laskar-laskar pada suatu pertempuran. Kader-kader Mereu yang dikirim ke pelosok ita sudah diperhitungkan kuantitasnya dan memungkinkan menunjang keberhasilan jihad melawan Belanda. Sewaktu akan mengadakan penyerangan di Aceh Besar, sebelumnya sudah mengirinkan kader-kadernya kesana.

" ..... sehingga dalam waktu tiga bulan saja, keadaan di seluruh Aceh, terutama di Aceh Besar, telah terbakar oleh panasnya api jihad".<sup>66</sup>

Lain halnya dengan Teungku Tjihik Pante Pulu, seorang ulama dan seniman muslim yang terkenal di Aceh, dengan karyanya "Hikayat Prang Sabi", yang dapat menggerakkan semangat masyarakat Aceh.

Teungku Tjihik ini terpanggil untuk berperang melawan Belanda melalui hasil karya penanya.

Sewaktu berada di Mekkah, ia menulis sebuah hikayat. Setelah menyelesaikan tulisannya, Teungku Tjihik kembali ke Aceh, dan menyerahkan tulisannya, yang di beri nama "Hikayat Prang Sabi" kepada Teungku Tjihik Di Tiro. Karya itu dipersembahkan kepada perjuangan masyarakat Aceh melawan Belanda. Sevenarnya peranan

---

66 Ibid, hal.41-42.

hikayat pada masyarakat Aceh bukan hal yang baru. Hikayat sudah banyak berperan sebelum adanya agama Islam sampai pada awal penyebaran Islam di Aceh.

Peranan pertama ditujukan untuk menggeser unsur - unsur Hindu dan menanamkan nilai-nilai Islam pada masyarakat.

"Suatu hal yang perlu kita ingat dalam masa-masa permulaan Islam itu, ialah penggeseran orientasi nilai budaya masyarakat, dari Hinduisme ke - pada Islam. Dalam saat itu, Hinduisme berada dalam arus tersebut. Sebaliknya pengaruh Islam sedang berusaha memperkuat kehadirannya. Dalam usaha memperkuat kehadirannya itulah hikayat memainkan peranannya....."67.

Perang melawan Belanda, tepatnya setelah adanya pernyataan perang dari Belanda kepada Kerajaan Aceh, yang tertulis pada tanggal 26 Maret 1873 dan disampaikan pada Shultan pada tanggal 1 April 1873.<sup>68</sup>

Telah disebutkan di atas, bahwa masyarakat Aceh mengalami keparahan dalam kehidupan sosial dan perasaan putus asa di dalam melawan Belanda di bawah kepemimpinan para uleebalang, maka keberadaan/kehadiran Hikayat

---

67 UU Hamidy, Peranan Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh, dalam bukunya Alfian (Editor), Segi-segi Sosial budaya Masyarakat Aceh, Op.Cit, hal.33

68 Lihat Moh Said, Aceh Sepanjang Abad, hal. 389  
400.

Prang Sabi memang diperlukan pada waktu seperti itu. Hikayat tersebut menjawab semua permintaan, harapan dan pertanyaan masyarakat kala itu. Masyarakat memerlukan iklim sosial yang bersahabat dan saling menunjang, dan para pejuang membutuhkan semangat baru untuk bertempur. Inilah inti pokok dari isi hikayat Prang Sabi.<sup>69</sup>

Untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang pengaruh Hikayat Prang Sabi pada masyarakat Aceh pada waktu itu, kami kutipkan beberapa tanggapan dan tulisan para ahli Sejarah Islam Indonesia.

"This ulama activity of the 1880's produced a wholene literature of popular epic poetry in Atjehnese. The Hikayat Orang was the most famous of these exhortations to the holy war, but Teungku Tiro, Teungku Kutakarang and others also circulated their own shorter works stressing the helplessness of Islam. Scular poets like wise compose more intertining accounts of the heroism of the Atjehnese and the more comic aspects of Dutch polisies. These poems, read aloud by one of their member, became the most popular evining entertainment for the young men gathered in the Meunasah (Communual Hall)".<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> UU Hamidy, Peranan Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh, Op.Cit., hal.33

<sup>70</sup> Anthony Read, The Contact For North Sumatra, Aceh, The Netherland and Britain, The University of Malaya Press, I. Kuala Lumpur, 1969. hal.252.

" ..... Menig jong man deerstescheden op het oorslop ad onderden machtigen indruk dier lectuur opzijn emotioneel ziel..... zeer ge - vaarlijk." (..... para pemuda meletakkan langkah pertamanya dimedan perang atas pengaruh yang sangat besar dari karya ini (Hikayat Prang Sabi), menyentuh perasaan mereka yang mudah tersinggung ..... karya sastra yang sangat berbahaya.....<sup>71</sup>

Keberhasilan hikayat ini di sebabkan kejelian sipengarang di dalam memakai dan menggali nilai yang ada pada masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat, yaitu Islam. Selaun itu, keistimewaan hikayat ini disusun dalam bentuk syair, di mana masyarakat Aceh sangat dekat/senang terhadap syair-syair. Jadi terbitnya Hikayat Prang Sabi yang tersusun dalam bentuk syair ini disambut hangat oleh mereka. Untuk memberikan suatu gambaran sekilas tentang isi Hikayat Prang Sabi, perhatikan cuplikannya di bawah ini :

Dibawah bayangan pedang Jewani  
 Di sana sorga Allah tempatkan  
 Tempat hidup kekal abadi  
 Nikmat kurnia aneka ragam

.....

---

71 A. Hasyimi, Hikayat Prang Sabi, menjiwai Perang melawan Belanda, Op.Cit., hal.154.

Di hari nanti kurnia pasti  
 Pergilah kini kemedan perang  
 Mujahid sejati disayangi Ilahi  
 Sayang Allah kepada pejuang<sup>72</sup>

Isi yang demikian dapat membakar semangat pe-  
 juang-pejuang Aceh dalam melawan Belanda.

Karena bahayanya hikayat tersebut, sehingga pe-  
 merintah Belanda di Aceh menginstruksikan kepada se-  
 luruh masyarakat Aceh, dilarang keras menyimpang Hikayat  
 Prang Sabi.

Menurut Anzib, seorang pengarang yang berpendi-  
 dikan guru sebelum perang dunia ke II yang ahli bahasa  
 dan sastra Aceh, di dalam tulisannya 'Pengantar Naskah  
 Hikayat Orang Sabi' ia mengatakan :

"Apabila Belanda mengetahui ada orang yang me-  
 nyimpan Hikayat Prang Sabi, terus dirampas dan  
 penyimpanannya dihukum, demikian pula terhadap  
 siapa saja yang membacanya. Penyalin naskah  
 ini pernah mengetahui ada seseorang yang berna-  
 ma Leem Abah, penduduk Peurada pemukiman Kajee-  
 edang, daerah XXVI mukim (sekarang kecamatan  
 Ingin Jaya). Pada suatu malam dia mendengar  
 orang membaca Hikayat Prang Sabi. Besoknya tan-  
 pa diketahui oleh siapa pun, pada pagi - pagi  
 buta ia telah berada di pekan Aceh di depan

---

72 Ibid, hal 146

Societeit Atjeh clup (Sekarang Balai Umar), dimana dijumpai seseorang Belanda berjalan-jalan, lantas dengan mendadak Abah menhonus rencongnya yang disembunyikan dalam lipatan kain dan ditikam Belanda itu dadanya, hingga jatuh terlentang dan mati disitu juga. Teuku lagi Loem pada terus

Sesaat kemudian, Loem Abah tersebut terus ditangkap dan diinternir ke Pulau Jawa, yang mungkin telah dibunuh sebab sudah tidak pernah pulang lagi ke Atjeh. di mung-pu-

Peristiwa ini terjadi dalam tahun 1907, pada waktu pertama kali Belanda menetapkan wajib bayar pajak bagi orang Atjeh. ba -

Selain dari pada peristiwa tersebut pada masa itu, masih banyak lagi terjadi kejadian-kejadian yang serupa, dimana kejadian satu dua orang masuk kota dan terus membunuh Belanda, sehingga diadakan penjagaan yang ketat, dan siapa saja yang dicurigai terus ditangkap. saja

Demikian tajam dan berbisananya kandungan Hikayat Prang Sabi itu. Karena itulah, maka Belanda takut setengah mati kepada orang yang membaca atau pun mendengar Hikayat Prang Sabi itu.

Lantaran itulah, dimana saja diketahui ada orang menyimpan hikayat tersebut, terus dibeslah (diambil dengan paksa) dan penyimpanannya dihukum berat, agar orang lain menjadi ketakutan".<sup>73</sup>

---

73 Ibid, halaman.56. Lihat Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial (editor), CV. Rajawali, Jakarta, 1983. halaman 49 - 50.

Bila dilihat tahun kejadian di atas dengan ta-  
 hun adanya Hikayat Prang Sabi, diperkirakan sekitar se-  
 perempat abad. Walaupun demikian, kekuatan daya tarik  
 nya terhadap masyarakat Aceh masih kuat. Maka tak meng-  
 herankan bila Belanda menganggap hikayat ini suatu  
 yang membahayakan.

Keberhasilan ulama, baik psikis maupun fisik di  
 dalam berperan membela masyarakatnya membawa mereka pa-  
 da posisi yang mantap di dalam memimpin masyarakatnya.  
 Jadi tidak mengherankan bila pada masa-masa selanjutnya  
 masyarakat Aceh selalu berbaris di belakang ulama mere-  
 ka selaku pemimpin.

Inilah sekilas sejarah ulama dan peranannya pada  
 masyarakat Aceh sebelum terbentuknya PUSA ( Persatuan  
 Ulama Seluruh Aceh) di Aceh.

#### b. Latar Belakang Berdirinya PUSA.

Tinjauan dari segi sosial politik maupun ekonomi  
 menunjukkan bahwa masyarakat Aceh benar-benar terampas  
 haknya sebagai masyarakat di wilayahnya sendiri. Seba-  
 gaimana telah dijelaskan di atas tentang kedudukan ula-  
 ma Aceh di hati masyarakatnya, maka dalam keadaan seper-  
 ti itu masyarakat Aceh masih memandang ulama sebagai  
 pemimpin yang dapat membawa mereka pada kehidupan yang  
 terlepas dari penindasan, kekejaman dan perampasan hak.

Masyarakat Aceh sebelum berdirinya PUSA (Perkumpulan Ulama-ulama Seluruh Aceh) sebagai mana telah di jelaskan sebelumnya, taraf pendidikan mereka sangat menurun, yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor politik maupun ekonomi. Sarana pendidikan tradisional, seperti dayah, makin lama makin tersaingi oleh sarana-sarana pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda memandang bahwa kesulitan yang dihadapinya di dalam mengatur masyarakat Aceh disebabkan oleh pengaruh pendidikan Islam yang ada di dayah-dayah. Semua pendidikan yang diajarkan oleh ulama anak-anak hanya hendak menanamkan rasa benci dan kutukan kepada Belanda sebagai penjajah yang kafir. Bahkan Pemerintah kolonial Belanda memandang bahwa para ulama menanamkan rasa benci kepada anak-anak didiknya terhadap Belanda dengan terus menerus menyalah artikan Al Qur'an.<sup>74</sup>

Melalui penasehat Islam Politiknya, Pemerintah kolonial Belanda menjalankan ordinasi guru di Aceh-pada tahun 1913. Sedang di Jawa kebijaksanaan ini sudah

---

<sup>74</sup> Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Pustaka SH. Jakarta, 1987, halaman.52.

dijalankan sejak tahun 1905.<sup>75</sup>

Ordinal guru ini hanya dikhususkan bagi guru-guru yang mengajar agama Islam di Aceh. Dengan diadakan pengawasan terhadap guru-guru agama, diinginkan agar pemerintah kolonial tidak banyak mengalami kesulitan di dalam mengatur masyarakat Aceh.

Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan pengetatan di dalam mendirikan dayah-dayah baru. Setiap ada pembangunan dayah sebelumnya harus mendapat ijin dari pemerintah. Untuk mendapatkan ijin mendirikan dayah harus menyodorkan surat permohonan dengan melampirkan mata pelajaran yang akan diajarkan, yaitu pelajaran membaca, menulis bahasa arab, tauhid dan fiqih (syari'at Islam) saja.

Selain itu, setiap pelajar dari luar kota yang hendak belajar di sebuah dayah diharuskan mempunyai surat keterangan dari pemerintah Belanda setempat dan bila sudah menetap diharuskan pula melapor setiap tiga bulan sekali.<sup>76</sup>

Dalam melaksanakan kebijaksanaan ini, pemerintah

---

<sup>75</sup> Lihat Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial, Op.cit, hal.55

<sup>76</sup> Ibid.

Belanda tidak merasa perlu mengadakan musyawarah dengan kekuatan masyarakat yang ada, yaitu ulama. Sebab sudah dapat dipastikan hal itu tidak akan mendapat persetujuan dari mereka, walaupun dengan alasan demi ketertiban.

Sikap kebijaksanaan ini diambil karena nasehat Snpuck Horgronye, Penasehat Islam Politeik pemerintah kolonial Belanda.

"..... secara halus pemerintah Hindia Belanda, juga menekankan kepada para zelfbestuurder di luar ke dua daerah tersebut (Aceh Besar dan Singkel) untuk bertindak lebih hati-hati. Mungkin hal ini sebagai akibat dari DR. Hurgronye yang antara lain berbunyi : 'Jangan coba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari pada ulama. Sebab keyakinan merekalah yang menyuruh mereka melawan Belanda. Terhadap mereka haruslah pelor yang berbicara.'<sup>77</sup>

Sudah dapat dipastikan bahwa sebagian dayah-dayah yang ada setelah turunnya kebijaksanaan ini mutu pendidikannya makin menurun, tidak sebaik dayah-dayah di jaman sebelum jatuhnya wilayah Aceh di tangan Belanda.

---

<sup>77</sup> Drs. H. Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektif - Sejarah, op.cit, halaman 56. Lihat M. Said, Aceh Sepanjang Abad, halaman 65 dan 368.

Untuk menjatuhkan pamor dayah lebih dalam lagi, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum yang diperuntukan anak-anak uleebalang. Mereka ini dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda yang dapat membawa aspirasi pemerintah di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Telah disebutkan di atas bahwa dayah adalah suatu tempat yang menampung seorang santri untuk bermukim dan belajar ilmu pengetahuan agama Islam kepada seorang ulama. Sarana dan sistem pendidikan seperti dayah ini sudah dikenal sejak lama di Aceh.

Belanda di dalam mendirikan sekolah - sekolah umum ini merupakan suatu bagian yang menyeluruh dari strategi 'pasifikasi' penertiban daerah Aceh, dan juga mengadakan sekolah tandingan bagi dayah-dayah yang di kelolah oleh ulama.

"Suatu usaha khusus telah dijalankan untuk menggantikan pendidikan kaum ulama ini dengan suatu sistem sekolah pemerintah, bukan disebabkan maksud baik atau untuk persediaan pegawai-pegawai yang terpelajar, tetapi sebagai suatu bagian yang menyeluruh dari strategi 'pasifikasi' penertiban daerah Aceh".<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, op.cit, halaman 52.

Pertama yang dituju oleh pendidikan kolonial ini adalah anak-anak uleebalang. Mereka dididik agar menjadi calon-calon raja untuk hari depan dalam bahasa, pandangan hidup dan praktek-praktek kerja biokrasi dalam mengendalikan kekuasaan.

Tercatat pada tahun 1938, sekolah-sekolah yang bernama HIS (Holland Inlandse School) sudah berjumlah 8 sekolahan dengan 1.500 murid. Tercatat pula tahun 1930, telah didirikan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), setaraf dengan SMP, yang merupakan lanjutan dari HIS. Kaum eleebalang menyambut baik berdirinya sekolah-sekolah ini. Pada tahun 1938, lulusan MULO sudah banyak dikirim ke sekolah lanjutan Belanda ke Bukit Tinggi atau Jawa.<sup>79</sup>

Untuk rakyat biasa, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah rakyat desa (Volks School) pada tahun 1907. Pada tahun 1935, murid volks school sudah mencapai 33.000 anak. Bila dibanding dengan jumlah murid di Jawa maupun daerah lain di Indonesia maka di Aceh lebih tinggi sedikit jumlah murid volks schoolnya. Angka perbandingan ini ada pada Atlas Vas Tropisch Nederland (1938).<sup>80</sup>

---

79 Ibid.

80 Ibid, halaman 72

Awal terjadinya sekolah-sekolah tandingan ciptaan Belanda ini dapat menciptakan suatu gejala kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat Aceh, bahkan sebagian dari ulama ada yang mengeluarkan fatwa yang mengka--firkan mereka yang mempelajari aksara Latin maka akan kehilangan tangan kanannya di alam baka kelak.

Fatwa-fatwa ulama seperti di atas sudah jelas mempunyai pengaruh pada masyarakat Aceh di dalam menerima pendidikan ala kolonial ini, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak mau mengikuti pelajaran di vokls school, sehingga pemerintah kolonial Belanda memaksa para wali murid dengan ancaman bila tetap membiarkan - anak-anaknya tidak mengikuti pelajaran di volks school.

Perlu diketahui di sini, bahwa pada tahun 1920 banyak pula berdiri sekolah-sekolah rakyat moderen (sistem dan sarana pendidikannya). Sekolah-sekolah tersebut didirikan oleh SI (Serikat Islam),<sup>81</sup> Muhammadiyyah dan Taman Siswa. Sekolah-sekolah ini dibangun untuk menandingi ulang terhadap sekolah-sekolah rakyat yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Sekolah - sekolah yang didirikan oleh ketiga organisasi tersebut bercorak kebangsaan, hanya saja sekolah-sekolah SI dan Muhammadiyyah juga mempunyai corak keagamaan, atau sekolah agama

---

81 Ibid, hal.52

Islam yang sudah dipermoderen sarana dan sistem pendidikan annya.

"Dua organisasi terbesar pendidikan partikelir Indonesia pada waktu itu adalah Muhammadiyah dan Taman Siswa, masuk di Aceh masing-masing pada tahun 1928 dan 1932, dua organisasi modern - yang berdasarkan pendidikan kebangsaan dan persatuan Indonesia".<sup>82</sup>

Pertumbuhan sekolah-sekolah yang diperkarsai oleh organisasi-organisasi Islam mempunyai corak yang berbeda beda, Suatu misal, sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah lebih bercorak radikal, sedangkan lainnya bercorak tradisional.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah ini banyak mendatangkan guru-guru muda yang mendapat pendidikan dari Sumatra Barat (Thowalib), Jawa, bahkan dari Mesir dan Mekkah. Para pengajar di sekolah-sekolah tersebut ber aliran revormis, yang tidak terikat oleh madzhab fighiyah yang ada dalam agama Islam. Sedang sebelum datangnya para pengajar tersebut kehidupan keagamaan di Aceh di warnai oleh ajaran madzhab Imam Syafi'i. Keadaan seperti ini berlangsung sejak jaman raja Iskandar Stani hingga adanya para pengajar dari luar di Aceh, masyarakat ber -

---

82 Ibid, hal.72.

pegang teguh dengan aliran Ahlu Sunneh Wal Jama'ah (Abu Musa Al Asy'ari).

"Sesudah Muhammadiyah masuk di Aceh, mengenai fiqih pun mulai ada perbedaan aliran. Artinya mulai ada yang menganut pendapat yang lain dari madzhab Syafi'i. Muhammadiyah tidak mengikat - kan diri kepada madzhab tertentu; setiap masa - lah diperiksa dalil-dalilnya. Mana yang dailil - nya kuat itulah yang diambil. Untuk itu Muham - madiyah membentuk majlis khusus, yang dinama - kan Majlis Tarjih, .... tetapi karena tokoh-to - koh Muhammadiyah di Aceh bukan para ulama maka aliran itu mula-mula tidak mendapat pasaran. Masyarakat Aceh tidak menaruh kepercayaan ter - hadap hukum Islam yang disampaikan oleh bukan para ulama, lebih lagi hukum yang disampaikan itu banyak berbeda hukum yang mereka dengar da - ri pada ulama yang mereka percayai".<sup>83</sup>

Untuk lebih jelas mendapat suatu gambaran ten - tang perbedaan aliran dan dampaknya di dalam pendidikan di Aceh, perhatikan tulisan Anthoni Reid ini.

"Banyak guru muda lulusan perguruan Thowalib dan lembaga-lembaga pendidikan yang beraliran reformis di Sumatra Barat telah digolongkan ke - pada kaum muda yang menentang kebiasaan-kebiasa - an kaum tua yang konservatif, masih menjalankan ketentuan-ketentuan ibadat yang dianggap tidak

---

<sup>83</sup> Drs. H. Ismuha, Ulama Aceh dalam Perspektif - Sejarah, Op.Cit.hal.33

perlu, dan ada yang dianggap bertentangan dengan ketentuan agama Islam sendiri, seperti umpamanya pembacaan talkin pada penguburan jenazah, masih mewajibkan sembahyang lohor sesudah sembahyang Jum'at, dan lain-lain".<sup>84</sup>

Pertentangan ini dikenal dengan pertentangan antara kaum muda dan tua. Tetapi pada tahun 1930, ada usaha-usaha dari ulama-ulama yang berfikiran terbuka, untuk menyelesaikan pertikaian yang tidak sehat. Keberhasilan dari usaha-usaha tersebut tercermin dalam kesetiaan kawanannya untuk berjuang bersama melawan peraturan Gubernur-nemen yang dikenal dengan "Ordonansi sekolah liar" dan perlawanan bersama terhadap aliran sesat "Ahmadiyah" pada tahun 1932.

Sejak itu kedua belah pihak menyadari bahwa perbedaan yang selama ini pada mereka sudah menuju pada persaingan yang tidak sehat dan tidak menguntungkan, khususnya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Kaum tua yang mempunyai andil besar di dalam menyelesaikan pertikaian itu, diantaranya, ialah Teungku Muhammad Daud Beureuh, dengan Jam'iyatul Diniyahnya. Daud Beureuh

---

<sup>84</sup> Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Op.cit, hal.56

dengan kelihaiannya menarik masyarakat, dapat menyadar-  
kan mereka untuk bersatu, tidak meneruskan perbedaan  
perbedaan yang ada kepada persiapan-persiapan yang  
tidak sehat.

"..... serangkaian tabliq yang berturut - turut,  
dengan pidato yang bersifat lunak dari gerakan  
pembaharuan lainnya diadakan di kota-kota hanya  
berhasil pengunjug sejumlah beberapa ratus  
orang, maka sejumlah lebih 7.500 orang akan ber-  
bondong-bondong berjalan kaki datang kehalaman  
masjid kecil di desa-desa untuk menghadiri tab-  
liq dari Djam'iyatul Diniyah."<sup>85</sup>

"....., maka Daud Beureueh termasuk salah seorang  
yang berjuang untuk membangkitkan kembali Islam  
dalam tradisinya yang asli. Suatu perubahan, per-  
tama-tama harus ada pada setiap hati manusia,  
pada kesediaan seseorang untuk melaksanakan  
dengan kesadaran kewajiban-kewajiban agamanya".<sup>86</sup>

Apa yang diusahakan oleh Daud Beureueh dan para  
ulama di Aceh untuk memadamkan persaingan di antara  
kaum tua dan kaum muda, membawa hasil walaupun tidak  
secara menyeluruh.

Usaha lebih lanjut dari usaha ulama dalam mema-  
damkan api persaingan itu adalah berinisiatif untuk

---

<sup>85</sup> Ibid, hal.56 - 57

<sup>86</sup> Ibid, hal 57.

membentuk wadah yang menghimpun para ulama seluruh Aceh. Dengan wadah tersebut mereka menginginkan dapat memperkecil perbedaan-perbedaan mereka dalam menghadapi masalah pendidikan, keagamaan dan politik di daerah masing-masing.

### c. Tujuan Berdirinya PUSA.

Sebelum membicarakan tujuan berdirinya PUSA (Peratuan Ulama-ulama Seluruh Aceh), perlu kiranya disini dijelaskan proses berdiri dan diresmikannya organisasi tersebut.

Sebelum organisasi ini diresmikan, memang sudah ada kesepakatan antara beberapa ulama untuk membentuk organisasi untuk menghimpun seluruh ulama Aceh.

Teungku Abdurrahman dari Meunasah mencap, seorang ulama yang juga mempunyai andil besar di dalam meredakan apriori masyarakat di dalam menghadapi tantangan pembaharuan sistem pendidikan dari Belanda dan faham-faham baru yang masuk ke Aceh ini, dengan mendirikan madrasah Al Muslim Peusangan di Matanggelumpong Dua, telah lama merasakan perlu adanya suatu wadah yang dapat menyatukan ulama di Aceh. Hasrat ini dikemukakan oleh Teungku Abdurrahman kepada beberapa kawannya yang berada di Peusangan.

Suatu hari, Ia mendapat undangan maulid di Blang

Jrue, sebagai pembicara dalam acara tersebut. Kedatangannya disambut oleh Teungku Ismail Ya'qub, direktur madrasah Bustarul Ma'arif, di Blang Jruen. Dalam pembicaraan tidak resmi, keduanya sepakat untuk membicarakan tentang masyarakat Aceh, pada masa itu. Puncak pembicaraan keduanya menghasilkan suatu kesimpulan, perlu adanya kesatuan ulama seluruh Aceh. Untuk hal terakhir ini keduanya sepakat untuk membentuk suatu organisasi.

Seusai acara Maulid, Teungku Abdurrahman kembali ke Matagekumpang, dan langsung membicarakan hasil pembicaraannya dengan Teungku Ismail Ya'qub kepada para ulama di daerahnya. Mereka semua sepakat dan memutuskan untuk menulis surat kepada ulama seluruh Aceh tentang hasrat mendirikan organisasi tersebut. Di antara ulama-ulama tersebut yang mendukung ide ini ialah Teungku Muhammad Daud Beureuh, di Sigli.

"Setelah persiapan dianggap cukup, maka Teungku Abdurrahman Meunasah mengundang semua ulama yang dianggap patut dan mempunyai pengaruh di Aceh untuk menghadiri suatu musyawarah ulama yang akan dilangsungkan di Matanggelumpang Dua, tepat pada hari perayaan Maulid Nabi, yaitu tanggal 12 Robiul Auwal 1358 H, bertepatan dengan 5 Mei 1939 M."<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Drs. H. Ismuha, Ulama Aceh dalam Perspektif - Sejarah, Op.cit, hal.58

Sebagai pembicaraan dalam acara Maulid tersebut, diantaranya adalah Ismail Ya'qub, Ia menjelaskan panjang lebar ide Teungku Abdurrahman untuk mendirikan organisasi ulama kepada masyarakat. Di dalam sambutan itu juga diterangkan maksud dan tujuan dari organisasi yang akan dibentuk.

Setelah disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian diadakan pemilihan Hoofdbestuur (kepengurusan) PUSA. Adapun kepengurusan tersebut sebagai berikut :

"Ketua I	: Teungku M. Daud Beureuh.
Ketua II	: Teungku Abdurrahman Neunasah Meucap.
Setia Usaha I	: Teungku M. Nur Al Ibrahimy.
Setia Usaha II	: Teungku Ismail Yakob.
Bendahari	: T.M. Amin
Komisaris	: Tgk. Abdul Wahab Keunaloe Seu limeum. Tgk. Syikh Haji Abdul Hamid Samalanga. Tgk. Usman Lampo Awe Tgk. Yahya Baden Poudada. Tgk. Mahmud Simpang Ulim Tgk. Ahmad Damanhuri Takengon. Tgk. M. Daud Tgk. Usman Aziz Lho' Sukon.88

"Sesuai dengan anggaran dasar yang menetapkan bahwa Hoofdbestuur-berkedudukan di tempat ketua I dan setia usaha I, maka Sigli menjadi tempat kedudukan Hoofdbestuur PUSA". 89

Dari uraian di atas jelaslah bahwa maksud awal didirikannya PUSA adalah :

1. Berusaha untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan dan mempertahankan agama Islam.
2. Mempersatukan faham para ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam.
3. Memperbaiki dan mempersatukan sekolah-sekolah agama Islam di seluruh Aceh.

Banyak dari kalangan ulcebalang di kala itu salah tafsir akan berdirinya organisasi PUSA tersebut. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa para ulama akan mengembalikan kekuasaan sultan di Aceh. Hal demikian tidak dikehendaki oleh mereka yang banyak mendapat keuntungan dari kedudukan yang diberikan oleh kolonial Belanda.

#### d. Konsolidasi.

Sebuah organisasi, sebagaimana lazimnya, setelah

---

89 Drs. H. Ismuha, Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah, Op.cit, hal.58.

diresmikan dan jelas tujuan berdirinya pasti akan mengadakan konsolidasi di berbagai segi untuk menuju kesuatu tujuan yang hendak dicapai, begitu juga organisasi - PUSA.

Organisasi ini sudah mengadakan konsolidasi secara total sejak diadakan konggres pertamanya di suatu tempat, dekat Sigli, pada bulan april 1940.

"Terutama sejak konggresnya yang pertama dekat Sigli pada bulan april 1940, PUSA jelas merupakan organisasi yang lebih bisa dikatakan gerakan rakyat menyeluruh sehingga menarik golongan-golongan lainnya ke bawah payung panjinya".<sup>90</sup>

Dari konggres PUSA yang pertama itu menghasilkan beberapa hal yang penting, di antaranya :

1. Suatu warna baru dari organisasi yang semula bergerak dalam pendidikan saja. Sejak kongres itu, PUSA memperluas diri dalam ruang gerak-nya, hingga mencakup bidang politik.
2. Terbentuknya kependuan PUSA, yang pada tahun 1934 dikenal dengan Kasyafatul Islam. Tetapi setelah kongres pertama PUSA, kependuan itu di bawah naungan PUSA, yang kemudian dikenal Kependuan PUSA.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerjaan Di Sumatra, Op.cit.hal.59

<sup>91</sup> M. Nur El Ibrahimy, Teungku Daud Beureueh, Op Cit,hal.8.

3. Terbentuknya Pemuda PUSA, yang diketahui oleh seorang ulama muda, Tgk. Amir Husin Al Muja-hid, karena keuletannya dalam berjuang.

PUSA setelah konggresnya yang pertama menjadi organisasi yang wawasannya makin luas, tidak hanya terbatas dalam bidang pendidikan formil, tetapi mencakup juga pendidikan non-formil dan politik. Selain itu juga mengadakan kaderisasi di kalangan pemudanya untuk kelanjutan organisasinya. Ini menunjukkan bahwa PUSA pada awal-awal berdirinya menunjukkan kedewasaannya.

Adanya antipati dan misandestanding dari sebagian uleebalang juga dapat menyebabkan konflik nyata di antara ulama dan uleebalang. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sebagian uleebalang beranggapan bahwa berdirinya PUSA bertujuan untuk mengembalikan kesultanan Aceh. Konflik yang disebabkan oleh sangkaan yang salah ini memaksa PUSA untuk makin jauh terjun dalam gelanggang politik.

"Tidak lama sesudah PUSA lahir, ada sementara yang menafsirkan tujuan PUSA untuk mendirikan kembali sultanat Aceh, dengan Zelfbestuur der dari Peusangan, Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah sebagai calon Sulatn, dan PUSA diartikan Persatuan Untuk Sultan Aceh. Hal ini ditimbulkan oleh rasa kekuatiran kalau sultanat Aceh dikembalikan oleh Belanda, maka kekuasaan

zelfbestuurder lainnya akan berkurang, hanya, Teuku Chik Peusangan saja yang baik.

PUSA terbentuk, sudah ada tulisan-tulisa dalam beberapa majalah dan surat kabar di Medan mengenai masalah sultanat di Aceh ..... Kedua, karena Zelfbestuurder dari Peusangan, Teuku Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah diangkat sebagai Beschem beer (Pelindung) PUSA".<sup>92</sup>

Selain itu, bersamaan dengan terbentuknya PUSA, politik Belanda dengan menyandarkan harapan kepada uleebalang ternyata tidak membawa hasil. Ketidak berhasilan tersebut dimungkinkan oleh merosotnya wibawa uleebalang di tengah-tengah masyarakatnya. Kesan seperti ini terlihat dari pernyataan P.J. Piekar, sekretaris gubernur PAUW di Aceh, yang menyimpulkan bahwa politik menyandarkan diri kepada uleebalang telah membawa Atjeh Politik kepada jalan buntu.<sup>93</sup>

Hasil pertama dari sikap baru Belanda ini adalah pemberhentian Teuku Umar yang kaya raya, uleebalang Keimangan, pada tahun 1938. Pemberhentian ini bukan karena ia tidak setia kepada Belanda, tetapi karena banyaknya keluan dan kecaman masyarakat terhadap pemerasan dan kecurangan yang dilakukannya.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Drs. H. Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah, op.cit, hal.60-61,

<sup>93</sup> Anthony Reid, Perjuangan Rakyat, Op.Cit, hal. 60.

<sup>94</sup> Ibid, hal.61

Inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda di Aceh bersifat relatif sabar dan tidak banyak respon terhadap protes uleebalang atas kebijaksanaan-kebijaksanaannya di dalam memberikan sedikit kebebasan PUSA di dalam melebarkan sayap kegiatannya.

PUSA di dalam mengadakan konsolidasi organisasinya banyak mendapatkan dukungan, baik dari sikap pemerintah Belanda terhadap uleebalang maupun dari mass media 'Penyoeluh' dan Seoruan 'Kita' yang banyak dibaca di Aceh kala itu.

"Dari tiga perubahan penting yang dituntut para penulis itu (dalam mass media Poeyoeluh dan Seroean Kita) adalah terbentuknya suatu dewan perwakilan rakyat dan mencabut kekuasaan para uleebalang atas pengadilan".<sup>95</sup>

Konflik antara ulama (PUSA) dan uleebalang makin ketika PUSA menuntut agar pendidikan agama dilepaskan dari kekuasaan raja-raja bumi putra.<sup>96</sup> Untuk keberhasilan tuntutan ini ulama-ulama PUSA mengadakan pertemuan dengan T. Sabi, seorang uleebalang yang dipandang oleh kalangan orang-orang PUSA dapat diajak bertukar pikiran

---

95 Ibid,

96 Ibid, hal.63

dalam masalah pendidikan agama.

Ketegangan keduanya makin gawat, bahkan mengarah kepada terjadinya suatu konflik fisik, setelah PUSA menjalankan peranannya sebagai juru bicara guna mengklaim, bahwa Pahlawan Perang Aceh yang sebenarnya bukan Teuku Umar, tetapi Teungku Chik Di Tiro. Hal ini terjadi pada tahun 1940 - 41.<sup>97</sup>

Konflik demi konflik dialami oleh kedua golongan ini sehingga jurang pemisah di antara keduanya makin melebar. Keadaan seperti ini menjadikan PUSA lebih waspada dan makin jauh memasukkan dirinya dalam gelanggang pertarungan politik di Aceh.

---

<sup>97</sup> Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, 1960, hal. 169-171.